

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pondok Pesantren Al Mawaddah yang berdiri sejak tahun 2009 di Ciganjur, Jakarta Selatan, salah satu lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam membentuk karakter santri melalui sistem pembinaan yang terstruktur. Pesantren ini memiliki sistem kedisiplinan yang diterapkan secara menyeluruh, baik dalam kegiatan belajar mengajar, ibadah, maupun kehidupan sehari-hari santri. Penerapan kedisiplinan di Al Mawaddah tidak hanya diwujudkan melalui aturan tertulis, tetapi juga melalui pembiasaan dan keteladanan yang diberikan oleh para pengasuh dan pengurus pesantren. Jumlah keseluruhan santri di Pondok Pesantren Al Mawaddah saat ini mencapai 314 santri, yang terdiri dari 142 santri putra dan 172 santri putri. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pesantren ini memiliki lingkungan yang cukup besar dan beragam, sehingga pelaksanaan kebijakan kedisiplinan menjadi aspek penting dalam menjaga keteraturan serta efektivitas proses pembinaan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik kedisiplinan di pesantren tidak selalu berjalan ideal. Berdasarkan data internal Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan, dari total 314 santri diketahui bahwa 81%, sebanyak 254 santri telah menunjukkan perilaku disiplin, sementara 19%, sebanyak 60 santri masih sering melanggar aturan. Bentuk pelanggaran yang terjadi antara lain keterlambatan salat berjamaah,

tidak hadir dalam kegiatan mengaji, keterlambatan masuk sekolah, keterlambatan datang ke pondok hingga pelanggaran berat seperti penggunaan kosmetik berlebihan bagi santri putri dan ketahuan merokok bagi santri putra. Dari total 60 santri yang melanggar tersebut, sebanyak 25 santri putri dan sebanyak 35 santri putra tercatat melakukan pelanggaran dalam berbagai kategori yang telah ditetapkan pihak pesantren. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan kedisiplinan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran santri (Wawancara pada tanggal 18 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB).

Kebijakan kedisiplinan di pesantren berfungsi sebagai seperangkat aturan dan ketentuan yang menjadi dasar pengaturan perilaku santri serta pedoman bagi lembaga dalam menegakkan tata tertib. Setelah kebijakan ditetapkan, fokus pembinaan diarahkan pada pembentukan karakter disiplin yang tampak dalam ketertiban, kepatuhan, dan konsistensi perilaku santri. Pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada aturan yang ditetapkan, tetapi juga pada faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta mekanisme struktur yang mendukung. Data internal pondok juga menunjukkan adanya penurunan tingkat pelanggaran kedisiplinan santri selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Pola penurunan menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kedisiplinan yang diterapkan secara konsisten mulai memberikan hasil positif dalam membentuk karakter dan kedisiplinan santri. Penurunan ini tidak semata-mata disebabkan oleh konsistensi penerapan aturan, tetapi juga oleh

tumbuhnya kesadaran kolektif dalam diri santri tentang pentingnya keteraturan dan tanggung jawab sebagai bagian dari nilai-nilai pesantren (Hasan, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kedisiplinan santri di lingkungan pesantren. Penelitian Nurhalim (2020) menekankan pentingnya keteladanan ustadz dalam membentuk karakter disiplin santri, sedangkan Fitriyani (2022) menggarisbawahi peran struktur organisasi dalam memperkuat tata tertib di pesantren. Sementara itu, penelitian Sari (2021) menyoroti efektivitas kebijakan disiplin yang diterapkan melalui metode pembiasaan dan kontrol pengurus, serta menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan disiplin bergantung pada konsistensi pelaksanaan aturan dan komunikasi yang harmonis antara pengurus dan santri.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian yang menelaah pelaksanaan kebijakan kedisiplinan secara menyeluruh dalam proses pembinaan karakter santri masih terbatas. Mayoritas kajian hanya berfokus pada peraturan dan perilaku disiplin, belum mengupas pelaksanaan kebijakan kedisiplinan secara konkret dalam kehidupan pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan kedisiplinan sebagai proses pembentukan karakter, bukan sekadar aturan. Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dengan melihat kedisiplinan sebagai bagian dari manajemen pesantren yang melibatkan pengasuh, pengurus, dan santri dalam membangun budaya disiplin yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari di pesantren.

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian santri secara menyeluruh. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan komunitas sosial dan sistem nilai yang membentuk pola pikir, perilaku, dan kedisiplinan peserta didiknya. Banyak sekali Pondok Pesantren yang telah tersebar luas di seluruh Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu membentuk karakter santri yang disiplin baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam berbagai kegiatan lainnya selama mereka tinggal di lingkungan pesantren (Zuhairini, dkk. 2007).

Data Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pondok pesantren terus mengalami peningkatan dan mencapai 42.391 lembaga pada tahun 2025. Di Provinsi DKI Jakarta terdapat 135 pesantren dengan lebih dari 31 ribu santri pada tahun ajaran 2021/2022 (Satu Data Kemenag RI, 2022). Adapun di wilayah Jakarta Selatan, tercatat sekitar 165 lembaga keagamaan yang meliputi pesantren dan asrama religius (Statistik DKI, 2024). Data ini mempertegas bahwa pesantren di daerah urban memiliki peran penting sebagai benteng pembinaan karakter santri yang hidup di tengah dinamika kota metropolitan.

Penelitian ini penting karena Pondok Pesantren Al Mawaddah memiliki pola pembinaan disiplin yang khas, terintegrasi dalam seluruh aktivitas santri, dan memadukan fungsi pengawasan dengan pembentukan karakter. Ciri khas ini menjadikan pesantren tersebut relevan dikaji sebagai model implementasi kebijakan kedisiplinan yang berorientasi pada pembinaan

karakter. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang penerapan kebijakan kedisiplinan dalam kegiatan pendidikan, kehidupan asrama, dan pengawasan santri. Temuan penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pengelola pesantren dan lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan kebijakan kedisiplinan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan karakter santri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan digali dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi kebijakan kedisiplinan santri dalam pembinaan karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan?
2. Bagaimana sumber daya yang tersedia pada pelaksanaan kebijakan kedisiplinan santri dalam pembinaan karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan?
3. Bagaimana disposisi pelaksana kebijakan kedisiplinan santri untuk membina karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan?
4. Bagaimana struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan kedisiplinan santri dalam pembinaan karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian dapat diklasifikasikan pada beberapa hal di bawah ini:

1. Untuk Mengetahui proses komunikasi kebijakan kedisiplinan santri dalam pembinaan karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan.
2. Untuk Mengetahui sumber daya yang tersedia pada pelaksanaan kebijakan kedisiplinan santri dalam pembinaan karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan.
3. Untuk Mengetahui disposisi pelaksana kebijakan kedisiplinan santri untuk membina karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan.
4. Untuk Mengetahui struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan kedisiplinan santri dalam pembinaan karakter disiplin di pondok pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman tentang kebijakan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Mawaddah dan dampaknya terhadap pembentukan karakter santri. Hasilnya dapat memperkaya kajian Manajemen Dakwah dan Manajemen Pondok Pesantren, khususnya dalam pengelolaan disiplin yang mendukung pembinaan akhlak. Selain itu, penelitian ini relevan dengan Manajemen Sumber

Daya Manusia (MSDM), karena kedisiplinan menjadi bagian penting dalam pembinaan SDM Islami yang berintegritas, taat aturan, dan berakhlak baik. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen pesantren yang berkualitas dan bernilai edukatif.

2. Secara Praktis

Bagi Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan, Penelitian ini dapat membantu pengelola Pondok Pesantren Al Mawaddah dalam memahami pelaksanaan kebijakan kedisiplinan yang diterapkan, sehingga dapat merumuskan implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam pembinaan kedisiplinan santri. Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan proses penerapan kebijakan agar selaras dengan nilai-nilai pesantren serta menciptakan lingkungan pesantren yang tertib, kondusif, dan mendukung kegiatan pendidikan serta pembinaan akhlak santri.

Bagi Peneliti dapat memberikan wawasan baru dalam bidang Manajemen Pondok Pesantren, khususnya dalam pengelolaan kebijakan kedisiplinan dan manajemen sumber daya manusia (MSDM) di pesantren. Hasil penelitian ini, bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pengelola pesantren dan pembuat kebijakan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, mengenai pentingnya kebijakan kedisiplinan yang tepat dalam menciptakan pondok pesantren yang efektif dalam mengelola santri.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa Aliran logika atau penalaran, yaitu kumpulan gagasan, definisi, dan proporsi yang disusun secara metodis, berfungsi sebagai landasan teori. Tidak mungkin memisahkan penelitian yang baru dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain di masa lalu (Sugiyono, 2018).

Maka dari itu, peneliti mengambil landasan teori yang sejalan dengan pengetahuan menurut Sugiyono ialah konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis yang mempunyai korelasi dalam Implementasi Kebijakan Kedisiplinan dalam Pembinaan Karakter Disiplin Santri.

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan yang telah disusun dalam bentuk peraturan atau arahan kebijakan ke dalam tindakan nyata oleh pelaksana di lapangan. Salah satu teori klasik yang paling berperan dalam memahami implementasi kebijakan dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) dalam bukunya *Implementing Public Policy*. Edwards menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak cukup hanya dengan menetapkan aturan atau program,

tetapi membutuhkan proses yang melibatkan koordinasi dan dukungan dari berbagai unsur (Edwards III, 1980: 10).

Pandangan Edwards III ini kemudian diperkuat oleh pendapat para ahli lainnya yang menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dan melibatkan banyak unsur. Hill dan Hupe (2014) memandang implementasi kebijakan sebagai proses berlapis yang melibatkan hubungan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan konteks organisasi. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh interaksi antaraktor di berbagai tingkat birokrasi. Sementara itu, Howlett (2019) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya, melakukan koordinasi, dan beradaptasi dengan perubahan sebagai bagian dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Menurut George C. Edwards III (1980), terdapat empat dimensi utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yang efektif merupakan unsur mendasar dalam pelaksanaan kebijakan yang berhasil. Edwards III menyatakan, “*For implementation to be effective, those*

whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do; orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate and consistent.” Artinya, agar implementasi berjalan dengan baik, para pelaksana harus mengetahui dengan tepat apa yang harus mereka lakukan, dan setiap instruksi kebijakan harus disampaikan kepada pihak yang berwenang secara jelas, benar, dan konsisten. Dalam praktiknya, komunikasi tercermin melalui kejelasan informasi kebijakan, kesesuaian dan ketepatan pesan yang disampaikan, serta penggunaan saluran komunikasi yang efektif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan kedisiplinan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada ustadz, ustadzah, pengurus, serta seluruh santri. Komunikasi juga mencakup kejelasan informasi mengenai tata tertib, keseragaman pesan antara pimpinan dan pelaksana, serta efektivitas saluran komunikasi seperti pengumuman, pengarahan rutin, dan evaluasi harian. Kejelasan dan konsistensi komunikasi menjadi dasar penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya yang memadai merupakan elemen vital dalam implementasi kebijakan. Edwards III menjelaskan, *“important resources include staff of proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information, and facilities.”* Artinya, sumber daya penting mencakup staf dengan jumlah yang sesuai dan keahlian serta fasilitas yang diperlukan; informasi yang relevan dan memadai.

Pada konteks pesantren, sumber daya meliputi kompetensi pelaksana dalam memahami dan menegakkan tata tertib, pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan pembinaan, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti jadwal kegiatan yang terstruktur, sistem pendataan pelanggaran, dan ruang pembinaan. Sumber daya yang memadai membantu memastikan bahwa kebijakan kedisiplinan dapat diterapkan secara terarah dan konsisten.

3. Disposisi (*Disposition*)

Sikap atau disposisi para pelaksana kebijakan juga sangat menentukan keberhasilan implementasi. Edwards III menegaskan bahwa, *“implementers must not only know what to do and have the capability to do it, but they must*

also desire to carry out a policy.” Artinya, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi komitmen, keteladanan, dan motivasi ustadz, ustadzah, dan pengurus dalam menjalankan kebijakan kedisiplinan. Sikap positif pelaksana terhadap aturan, kesediaan untuk memberikan pembinaan, serta dedikasi dalam mengawasi santri berperan besar dalam membentuk karakter disiplin yang berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Edwards III menyatakan, *“implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure, organizational fragmentation may hinder the coordination necessary”*, yang berarti bahwa pelaksanaan kebijakan dapat terhambat apabila struktur organisasi tidak tertata dengan baik, dan koordinasi antarunit tidak berjalan selaras.

Pada konteks penegakan kedisiplinan santri, struktur birokrasi yang jelas memberikan arah kerja yang teratur bagi seluruh pihak yang terlibat. Kejelasan tugas dan wewenang membuat pengasuh, para ustadz, ustadzah, pengurus organisasi santri, dan staf lain memiliki

pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing dalam proses pembinaan.

Ketegasan alur komando dan koordinasi yang teratur membantu penyampaian aturan, pengawasan, dan penegakan sanksi berjalan tanpa tumpang tindih. Selain itu, keberadaan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang tersusun dengan rapi memberi dasar bagi tindakan yang seragam, sehingga setiap pelanggaran disiplin ditangani dengan standar yang konsisten. Struktur birokrasi yang tertata akhirnya menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter disiplin, karena seluruh unsur lembaga bekerja selaras dalam menerapkan dan menjaga aturan.

Melalui keempat dimensi ini, Edwards III memberikan kerangka yang komprehensif dalam memahami proses implementasi kebijakan di berbagai jenis organisasi, termasuk di lingkungan pesantren. Dengan mengacu pada teori ini, penelitian ini akan mengkaji proses pelaksanaan kebijakan kedisiplinan santri, kendala yang muncul dalam penerapannya, serta respon para pelaksana dan santri sebagai bagian dari sistem organisasi pesantren dalam membina karakter disiplin santri secara menyeluruh.

b. Kedisiplinan

Kedisiplinan berkaitan dengan kepatuhan dan kesadaran individu dalam menaati aturan. Menurut Siagian (2010), kedisiplinan adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan,

baik tertulis maupun tidak tertulis, berdasarkan kesadaran diri. Hal ini mencerminkan komitmen seseorang dalam menjaga ketertiban dan mendukung tujuan lembaga.

Menurut Hasibuan (2016), kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mengikuti aturan secara konsisten dan bertanggung jawab. Disiplin bukan hanya sekadar patuh, tetapi juga menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban.

Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan dapat dipahami sebagai kesadaran dan komitmen individu untuk menaati aturan demi menciptakan keteraturan. Dalam konteks pesantren, kedisiplinan menjadi dasar dalam membentuk karakter santri, terutama terkait tata tertib harian, adab, ibadah, serta keteraturan hidup di asrama.

c. Karakter

Pembinaan karakter disiplin santri dapat dipahami melalui kerangka *Social Learning Theory* dari Albert Bandura (1986), yang memandang bahwa disiplin terbentuk melalui proses belajar sosial. Proses ini berlangsung dalam empat mekanisme utama: observasi (*observational learning*), peniruan (*modelling*), pembiasaan (*Habit Formation*), dan penguatan (*Reinforcement*).

Pertama, Observasi (*observational learning*) menjadi langkah awal dalam pembinaan disiplin. Santri mempelajari perilaku disiplin

dengan mengamati secara langsung bagaimana pengasuh, ustadz, ustadzah, dan pengurus organisasi santri menerapkan aturan mulai dari ketepatan waktu, kerapian, kepatuhan jadwal, hingga adab dalam mengikuti kegiatan. Melalui pengamatan ini, santri memperoleh model perilaku disiplin yang menjadi standar bagi mereka.

Kedua, Peniruan (Modeling). Setelah memahami contoh perilaku melalui pengamatan, santri mulai menirukan dan mempraktikkan kedisiplinan dalam rutinitas harian. Peniruan ini terjadi karena perilaku disiplin dipandang sebagai norma yang dihargai dalam lingkungan pesantren. Pada tahap ini, santri belajar mengatur diri, mengikuti tata tertib, menjaga kebersihan, dan menyelesaikan tugas tepat waktu sebagai bagian dari pembentukan karakter mereka.

Ketiga, Pembiasaan (Habit Formation). Disiplin dipraktikkan secara rutin sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari yang melekat. Tahap ini memastikan perilaku disiplin tidak hanya terjadi sesekali, tetapi terinternalisasi sebagai bagian dari gaya hidup santri.

Keempat, Penguatan (Reinforcement). Penguatan memainkan peran penting dalam memastikan perilaku disiplin benar-benar tertanam. Ketika santri menunjukkan kedisiplinan, mereka menerima apresiasi, kepercayaan tugas, atau pengakuan dari pendidik. Sebaliknya, ketidakdisiplinan diberikan teguran atau

konsekuensi mendidik. Pola penguatan ini membuat santri memahami bahwa perilaku disiplin memiliki nilai positif dan layak dipertahankan, sehingga secara bertahap menjadi karakter yang stabil dan terinternalisasi.

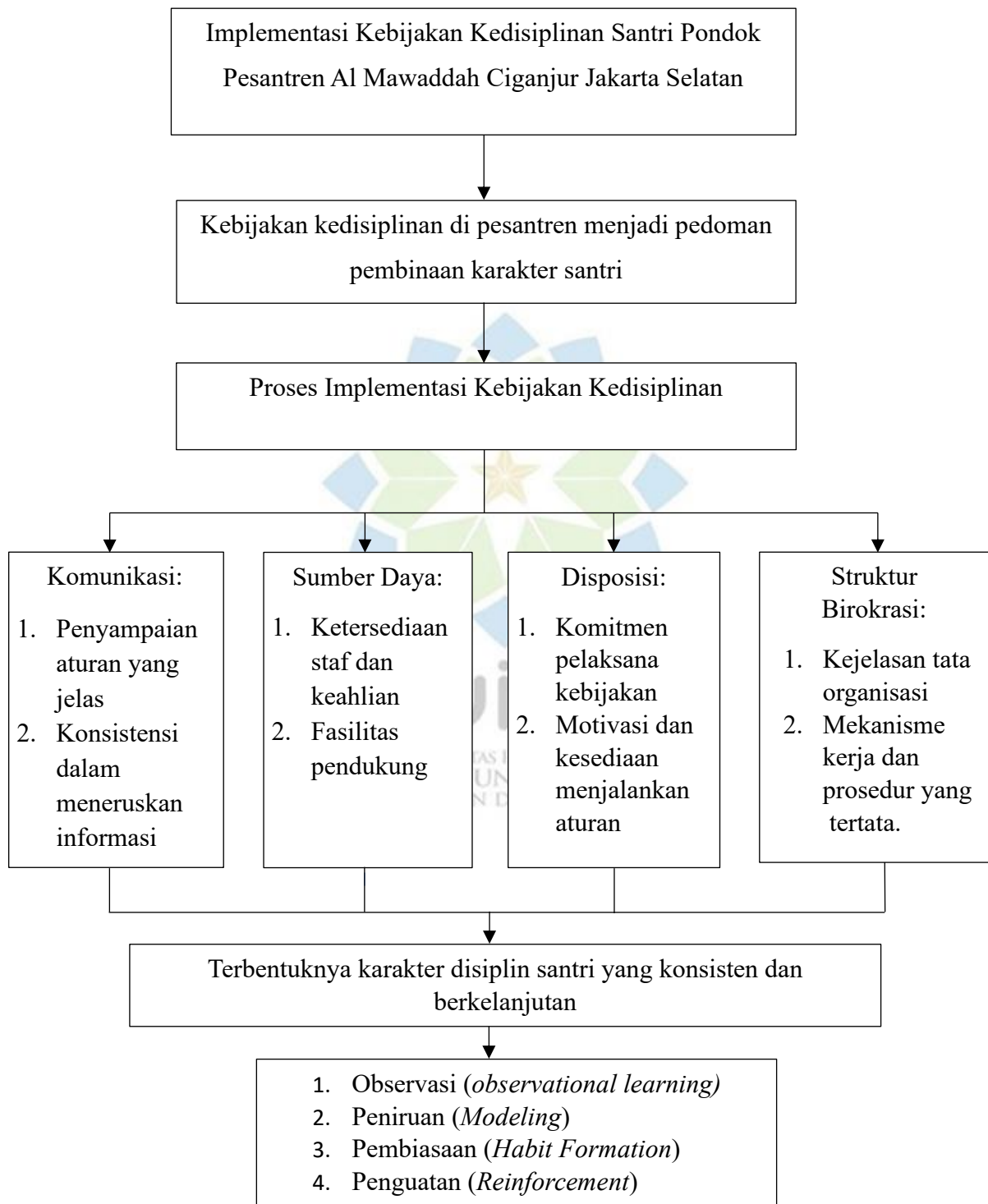
Melalui keempat mekanisme tersebut, Bandura menunjukkan bahwa pembinaan karakter disiplin bukan hanya hasil aturan formal, tetapi terbentuk melalui interaksi sosial, teladan, pembiasaan, dan penguatan yang bekerja secara bersamaan. Dengan demikian, disiplin santri berkembang bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena telah menjadi kebiasaan yang melekat dan diyakini sebagai nilai pribadi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berperan sebagai peta intelektual yang membantu peneliti untuk mengidentifikasi variabel, menetapkan fokus kajian, serta hubungan antarvariabel yang akan dianalisis secara mendalam. Dengan kata lain, kerangka konseptual tidak hanya menguraikan apa yang diteliti, tetapi juga bagaimana dan mengapa hal itu diteliti (Ravitch & Riggan, 2012).

Model George C. Edwards III (1980), menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada empat aspek utama: komunikasi aturan, ketersediaan fasilitas, keteladanan pelaksana kebijakan, dan mekanisme pengawasan. Jika keempatnya berjalan baik, pembinaan disiplin akan lebih efektif.

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Observasi Penulis, 2025

Kerangka konseptual penelitian ini menekankan bahwa kebijakan kedisiplinan di Pondok Pesantren Al Mawaddah menjadi landasan dalam pembinaan karakter santri. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui empat aspek utama menurut teori George C. Edwards III, yaitu: Komunikasi, melalui penyampaian aturan yang jelas dan konsisten. Sumber daya, berupa kesiapan staf, keahlian, dan fasilitas pendukung. Disposisi, yaitu komitmen dan motivasi pengurus dalam menjalankan aturan. Struktur birokrasi, meliputi kejelasan tata organisasi dan prosedur kerja yang tertata. Keempat aspek ini bekerja sama dalam proses implementasi sehingga menghasilkan karakter disiplin santri yang konsisten dan berkelanjutan.

Pembentukan karakter disiplin ini berlangsung melalui tahapan observasi, yaitu ketika santri melihat keteladanan dari pengasuh, pengurus, maupun lingkungan pesantren. Selanjutnya, santri meniru perilaku yang dicontohkan tersebut hingga menjadi kebiasaan melalui praktik yang dilakukan secara berulang. Kebiasaan ini kemudian diperkuat dengan pemberian penghargaan atau sanksi yang proporsional, sehingga perilaku disiplin semakin menguat dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari santri di lingkungan pesantren.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan, tetapi juga sebagai ruang sosial dan kultural yang

memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara mendalam (Moleong, 2019). Lokasi penelitian menjadi pusat interaksi antara pelaku sosial, kebijakan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam sistem tertentu. Oleh karena itu, pemilihan lokasi harus sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti agar data yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur, yang berada di bawah naungan Yayasan Baitul Rahim. Secara administratif, pondok ini beralamat di Jalan Sadar Raya No. 34 RT. 003/RW.004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, pesantren ini memiliki kebijakan kedisiplinan santri yang terstruktur, yaitu membentuk santri yang berakhlak, tertib, dan bertanggung jawab. *Kedua*, sistem kedisiplinan diterapkan secara formal melalui peraturan, pengawasan, dan pembinaan yang melibatkan seluruh unsur organisasi pesantren. Selain itu, peneliti memiliki kemudahan akses terhadap lokasi, sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan secara mendalam dan efektif untuk memahami keterkaitan antara kebijakan kedisiplinan dan pembentukan karakter disiplin santri.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang penulis gunakan adalah paradigma konstruktivistik. Paradigma konstruktivistik ini menganggap ilmu sosial sebagai

penelitian terstruktur terhadap tindakan yang memiliki makna sosial melalui observasi langsung yang mendalam terhadap individu-individu yang terlibat dalam menciptakan dan menjaga dunia sosial mereka (Hidayat, 2003: 3).

Berdasarkan paradigma konstruktivistik, penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa realitas sosial dibentuk melalui pengalaman, interaksi, dan pemaknaan individu terhadap lingkungan sosialnya. Dalam konteks ini, makna kedisiplinan santri dipahami sebagai hasil konstruksi bersama antara pengasuh, pengurus, dan santri dalam sistem kehidupan pesantren. Paradigma konstruktivistik memungkinkan peneliti menggali makna yang mendalam dari proses implementasi kebijakan kedisiplinan untuk membentuk karakter disiplin santri.

Menurut Moleong (2019: 4), pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan informasi berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual, dengan menekankan pada pemaknaan dan pengalaman subjek penelitian, bukan pada angka atau data statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan makna yang terkandung dalam kebijakan kedisiplinan, cara kebijakan tersebut diterapkan, serta bagaimana pembinaan karakter disiplin santri tercermin dalam praktik kedisiplinan sehari-hari.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Metode penelitian studi kasus digunakan untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dapat digunakan, baik untuk semua unit sosial seperti individu, kelompok, Lembaga, komunitas maupun untuk peristiwa, keadaan dan sebagainya (Sadiah, 2015: 81).

Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan menginterpretasikan secara mendalam pemaknaan dari kepala madrasah, waka kesiswaan, ustadz dan ustadzah, pengurus ISMAH (Ikatan Santri Al Mawaddah) dan santri terhadap pelaksanaan kebijakan kedisiplinan di Pondok Pesantren Al Mawaddah. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan kedisiplinan tersebut diimplementasikan, dijalankan, serta dihayati dalam sistem manajemen pesantren. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan kedisiplinan dalam pembinaan karakter disiplin santri.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan oleh peneliti, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam

menentukan sumber data. Penelitian ini berfokus pada pengamatan kondisi objek di lingkungan alaminya dan lebih menekankan pada pemahaman makna dibandingkan dengan generalisasi (Sadiah, 2015: 19).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan makna, pandangan, dan pengalaman subjek secara mendalam. Data ini berfokus pada persepsi santri dan pengurus terhadap kebijakan kedisiplinan yang diterapkan di pondok pesantren, serta dampak kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Oleh karena itu, data yang relevan sebagai berikut:

1. Pengurus pondok pesantren, seperti kepala madrasah, waka kesiswaan, ustadz dan ustadzah sebagai wali asuh, dan bagian tata tertib, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kedisiplinan.
2. Santri, sebagai objek kebijakan yang mengalami secara langsung pelaksanaan aturan dan pembinaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dokumen kebijakan internal, seperti tata tertib santri, catatan pembinaan, dan laporan pelanggaran, sebagai sumber tertulis yang menggambarkan struktur kebijakan dan mekanisme pelaksanaannya.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terbagi menjadi dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik itu individu maupun kelompok, yang dapat memberikan informasi secara langsung sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Husein Umar (2013: 42), data primer dihasilkan melalui metode seperti wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti.

Pada konteks penelitian ini, sumber data primer meliputi kepala madrasah, waka kesiswaan serta para ustadz dan ustadzah yang bertugas di Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan. Melalui data primer ini, peneliti berupaya menggali makna, dinamika, serta realitas yang terjadi secara faktual di lapangan, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan kedisiplinan tersebut diterapkan dan direspon dalam kehidupan keseharian pesantren.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal,

dokumen, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui kajian literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pesantren. Selain itu, wawancara juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data ini. Moleong (2018: 186) menjelaskan bahwa wawancara merupakan bentuk diskusi yang memiliki tujuan tertentu, biasanya untuk menggali informasi dari narasumber.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen internal pesantren, catatan kegiatan, arsip kebijakan, serta informasi tambahan yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara yang relevan. Data ini digunakan untuk memberikan konteks dan latar belakang terhadap pelaksanaan kebijakan kedisiplinan santri, serta memperkuat pemahaman mengenai struktur organisasi dan sistem pengelolaan yang berlaku di Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan. Keberadaan data sekunder ini menjadi pelengkap bagi data primer.

5. Penentuan Informan

a. Informan

Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait topik penelitian serta bersedia

memberikan informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, informan terdiri dari pengurus Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kedisiplinan santri. Mereka dipilih karena keterlibatannya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjadi fokus kajian. Adapun informan penelitian mencakup: 1) kepala madrasah, 2) waka kesiswaan, 3) ustadz dan ustadzah, 4) pengurus ISMAH (Ikatan Santri Al Mawaddah) serta 5) santri disiplin dan santri pernah melanggar di lingkungan pondok pesantren tersebut.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik *Purposive sampling* merupakan metode pemilihan informan yang didasarkan pada strategi pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih secara selektif karena dianggap memiliki peran dan pemahaman yang relevan terhadap implementasi kebijakan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati suatu objek atau

kejadian, baik secara langsung dengan hadir di lokasi penelitian maupun secara tidak langsung melalui pengamatan jarak jauh atau media tertentu (Riyanto, 2010). Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengidentifikasi serta memahami implementasi kebijakan kedisiplinan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan. Observasi ini juga bertujuan untuk menangkap dinamika keseharian di lingkungan pesantren, termasuk pola interaksi, pelaksanaan aturan, serta aspek manajerial dan operasional yang berkaitan langsung dengan kedisiplinan santri.

b. Wawancara

Wawancara, menurut King (2004), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog, baik secara lisan maupun tertulis, dengan individu atau kelompok tertentu yang memiliki informasi penting terkait topik yang sedang diteliti. Teknik ini dirancang untuk menggali data yang tidak dapat diungkap hanya melalui observasi, terutama terkait aspek kebijakan, pengalaman, atau pandangan yang dimiliki oleh narasumber.

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala madrasah, waka kesiswaan, ustadz dan ustadzah, pengurus ISMAH (Ikatan Santri Al Mawaddah) serta santri disiplin dan santri pernah melanggar untuk memperoleh informasi yang

mendalam dan relevan mengenai implementasi kebijakan kedisiplinan. Wawancara ini mencakup pembahasan tentang kebijakan kelembagaan, program-program yang mendukung pembentukan kedisiplinan, serta pendekatan yang digunakan oleh pihak pesantren dalam membina perilaku santri secara berkesinambungan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu metode penting yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Menurut Fuad dan Sapto (2013), dokumentasi adalah proses pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, catatan, atau arsip yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang bersifat faktual terkait implementasi kebijakan kedisiplinan santri.

Data yang dikumpulkan meliputi dokumen-dokumen seperti:

1) papan aturan pesantren, 2) buku pelanggaran santri, 3) foto kegiatan disiplin (apel), serta 4) arsip kebijakan tertulis lainnya yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan. Dokumentasi ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sistem organisasi pesantren serta mendukung validitas data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik validasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen, serta mencocokkan data dari berbagai sumber yang terlibat dalam penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi kredibel (Lincoln & Guba, 1985).

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi di Pondok Pesantren Al Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam bersama kepala madrasah, waka kesiswaan, ustadz dan ustadzah, pengurus ISMAH, serta santri disiplin dan santri pernah melanggar. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji konsistensi dan keakuratan data terkait implementasi kebijakan kedisiplinan santri, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

8. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan temuan di lapangan. Penyusunan ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti empat teknik utama analisis data dengan menggunakan metode studi kasus

menurut Stake (1995). Langkah-langkah ini menjadi pedoman untuk menganalisis data secara sistematis dan terstruktur, antara lain:

a. Pengumpulan Kategori (*Categorical Aggregation*)

Peneliti mengelompokkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen ke dalam kategori atau tema tertentu. Proses ini bertujuan untuk menemukan contoh nyata dan isu penting terkait penerapan aturan dan pembiasaan disiplin santri. Selain itu, pengelompokan dilakukan secara sistematis agar data yang bervariasi menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis.

b. Interpretasi Langsung (*Direct Interpretation*)

Peneliti menafsirkan data dari satu contoh atau kejadian tertentu secara langsung, misalnya perilaku santri dalam mematuhi aturan. Penafsiran ini membantu memahami makna tindakan dan sikap santri dalam konteks pembinaan karakter disiplin. Dengan demikian, setiap kejadian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terhadap proses pembinaan yang berlangsung.

c. Membentuk Pola dan Mencari Kesepadanan Antar Kategori

Setelah data dikategorikan, peneliti menganalisis hubungan antar kategori untuk menemukan pola atau keterkaitan, misalnya dalam proses penanganan pelanggaran. Analisis ini dapat divisualisasikan melalui tabel atau diagram sederhana untuk mempermudah pemahaman. Proses ini juga membantu memperkuat temuan melalui kesesuaian antar data.

d. Generalisasi Naturalistik (*Naturalistic Generalization*)

Kesimpulan diambil berdasarkan konteks kasus di pesantren, sehingga temuan dari satu kasus santri dapat diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hasil ini bersifat kontekstual dan dapat menjadi acuan bagi pesantren lain dengan kondisi serupa untuk memperkuat pembinaan karakter disiplin santri. Dengan begitu, hasil penelitian tetap relevan dan mudah diterapkan.

